

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12
TAHUN 2022**



**bank nbp
pt bpr nbp 12**

**Jl. Raya Puspitek No. 39 Rt.003/004 Kp. Pondok Benda Kel
Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten
TELEPON: 021-7561275**



BAB I

PENJELASAN UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 12 atau biasa disingkat menjadi PT. BPR NBP 12 adalah perusahaan jasa keuangan perbankan yang telah berdiri sejak tanggal 12 Oktober 1992, berdasarkan pengesahaan Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-7024 HT.01.01.Th.1992, dan izin untuk menjalankan usaha sebagai BPR yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-047/KM.17/1992.

PT. BPR NBP 12 mempunyai komitmen "Bersama Anda Membangun Usaha", sesuai dengan komitmen tersebut PT. BPR NBP 12 siap melayani pinjaman untuk Pengusaha Kecil dan Menengah dalam membangun usaha, demi tercapainya kesejahteraan ekonomi bagi nasabah, debitur, karyawan, serta pemilik perusahaan.

Visi

Menjadi BPR Terbesar di wilayah Tangerang Selatan

Misi

Memberikan pelayanan unggul yang menyentuh kebutuhan nasabah dengan cepat dan tepat sasaran

Mengembangkan produk dan jasa perbankan yang kompetitif dan berbasis teknologi

Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional

Sinergi yang kuat dengan Lembaga keuangan lain, Lembaga pendidikan dan pihak swasta

Memberikan kontribusi terbaik kepada kesejahteraan nasabah, karyawan dan pemilik

**BAB II****TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR****A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola****1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	MELKY ROMA TUA SINAGA
	NIK	:	3175092610760002
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Melakukan monitoring, pemantauan, melaksanakan penghimpunan dana BPR 2. Memberikan keputusan atas pemberian kredit BPR dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian 3. Bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha BPR 4. melaksanakan dan menjalankan hasil temuan audit baik rekomendasi dari pelaksana audit intern, ektern, komisari. otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya 5. Mencapai target sesuai dengan RBB tahun 2022			
2.	Nama	:	LEO
	NIK	:	3173040504890001
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
1. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR 2. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 4. menetapkan sistem dan produser kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank 5. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan 7. memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain 8. memberikan rekomendasi untuk produk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai dengan ketentuan baik ketentuan intern dan ekstern 9. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR 10. menganalisis mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkan secara efektif dan efisien 12. melakukan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan POJK dan peraturan perundang-undangan			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			



<ol style="list-style-type: none"> 1. direksi diminta untuk stress test terhadap ketahanan permodalan dan likuiditas BPR secara berkala dengan memperhitungkan kredit macet yang belum dapat diselesaikan lebih dari 2 tahun dan kecukupan pencadangan atas potensi peningkatan rasio NPL dan PPAP dari debitur yang mengalami kegagalan restrukturisasi kredit 2. untuk meningkatkan sumber dana dari tabungan khususnya tabungan berjangka (tabungan insan) 3. pada penyaluran dana direksi fokus untuk menyalurkan dana kepada usaha mikro (kredit prima) 4. menurunkan NPL dan monitoring penagihan dengan mengoptimalkan fungsi desk call yang dilakukan oleh CS dan admin kredit 5. Untuk mengisi kekosongan jabatan stuktur organisasi terutama bagian Pejabat Eksekutif melalui internal BPR 7. Membuat action tindak lanjut penyelesaian NPL 8. Meningkatkan pengarsipan pada semua dokumen BPR agar penatausahaan BPR lebih baik 9. Meminta untuk menindaklanjuti hasil temuan audit intern dan ekstern
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN
	NIK	:	3174010608810001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada direksi 3. Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Tidak mengambil keputusan terhadap operasional BPR kecuali mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur pemberian kredit 5. memastikan direksi melakukan tindak lanjut dari hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit Ekstern, hasil pengawasab dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya 			
2.	Nama	:	HENDRAWAN AGUS
	NIK	:	3275060412600002
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada direksi 3. Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Tidak mengambil keputusan terhadap operasional BPR kecuali mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur pemberian kredit 			



5. memastikan direksi melakukan tindak lanjut dari hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit Ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. direksi diminta untuk stress test terhadap ketahanan permodalan dan likuiditas BPR secara berkala dengan memperhitungkan kredit macet yang belum dapat diselesaikan lebih dari 2 tahun dan kecukupan pencadangan atas potensi peningkatan rasio NPL dan PPAP dari debitur yang mengalami kegagalan restrukturisasi kredit
2. untuk meningkatkan sumber dana dari tabungan khususnya tabungan berjangka (tabungan insan)
3. pada penyaluran dana direksi fokus untuk menyalurkan dana kepada usaha mikro (kredit prima)
4. menurunkan NPL dan monitoring penagihan dengan mengoptimalkan fungsi desk call yang dilakukan oleh CS dan admin kredit
5. Untuk mengisi kekosongan jabatan stuktur organisasi terutama bagian Pejabat Eksekutif melalui internal BPR
7. Membuat action tindak lanjut penyelesaian NPL
8. Meningkatkan pengarsipan pada semua dokumen BPR agar penatausahaan BPR lebih baik
9. Meminta untuk menindaklanjuti hasil temuan audit intern dan ekstern

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR NBP 12 memiliki modal inti dibawah 15 milyar maka tidak memiliki komite audit intern, komite pemantauan risiko dan komite remunerasi dan nominasi	

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tindak lanjut rekomendasi struktur keanggotaan, keahlian dan independensi anggota komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
formulir program kerja dan realisasi kerja komite tahun 2021 tidak ada			

B. Kepemilikan Saham Direksi**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	MELKY ROMA TUA SINAGA	3175092610760002	Rp0,00	0%
2.	LEO	3173040504890001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				



direksi tidak memiliki saham di bpr nbp 12 dan di perusahaan lain

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	MELKY ROMA TUA SINAGA	3175092610760002	-	-	0%
2.	LEO	3173040504890001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	MELKY ROMA TUA SINAGA	3175092610760002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	LEO	3173040504890001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	MELKY ROMA TUA SINAGA	3175092610760002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	LEO	3173040504890001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA DARI ANGGOTA DIREKSI					

**D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris****1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	Rp0,00	0%
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	Rp204.989.000,00	7.6%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
1. Komisaris Utama tidak memiliki saham di BPR NBP 12				
2. Komisaris memiliki saham dengan jumlah sebesar Rp. 204.989.000,- atau sebesar 7.60%				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	-	-	0%
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
TIDAK ADA					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR					



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp646.671.900,00	2	Rp389.233.333,00
2.	Tunjangan	2	Rp83.710.500,00	2	Rp54.761.000,00
3.	Tantiem	2	Rp5.937.000,00	2	Rp2.528.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp736.319.400,00		Rp446.522.333,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
1. adanya pergantian Direksi karena habisnya masa perodesasi Direksi pada tanggal 14 Juli 2022 yakni adanya pergantian Bapak Rudy Bodewyn Mangasa Tua diganti dengan Bapak Melky Roma Tua Sinaga					



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	GOLD VIP (6)	GOLD VIP (8)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Pengurus memperoleh fasilitas asuransi kesehatan yaitu asuransi inhealth			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.99 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.21 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0.42 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.88 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
gaji ini dihitung dihitung selama tahun 2022	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	18 Februari 2022	6	1. Langkah-langkah yang akan dilakukan
2.	05 April 2022	3	1. Pembahasan mengenai Notulen sebelumnya 2. Pembahasan mengenai pencalonan direktur utama 3. Pembahasan mengenai APU PPT 4. Pembahasan mengenai laporan Tata Kelola tahun 2021



			<ol style="list-style-type: none">5. Pembahasan mengenai Temuan IC6. Pembahasan mengenai manajemen risiko
3.	05 Mei 2022	6	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Notulen sebelumnya2. Pembahasan mengenai Debitur inti3. Pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan
4.	20 Agustus 2022	3	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Notulen sebelumnya2. Pembahasan mengenai pencalonan direktur utama3. Pembahasan mengenai APU PPT4. Pembahasan mengenai Temuan IC5. Pembahasan mengenai manajemen risiko
5.	30 Juni 2022	6	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Notulen sebelumnya2. Pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan
6.	10 Agustus 2022	6	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Notulen sebelumnya2. Pembahasan mengenai langkah-langkah untuk menurunkan NPL pada Agustus 20223. Pembahasan mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja BPR pada bulan Agustus 2022
7.	13 September 2022	7	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Notulen sebelumnya2. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menurunkan NPL3. Perkembangan Usaha sampai dengan Agustus 20224. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan laba pada bulan September 20225. Hasil temuan IC
8.	26 Oktober 2022	3	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Notulen sebelumnya2. Pembahasan mengenai debitur inti NPL3. Pembahasan mengenai 32 debitur inti (baki debit diatas Rp. 200.000.000,-)4. Hasil perkembangan usaha sampai dengan September 20225. Pembahasan mengenai APU PPT
9.	11 Desember 2022	3	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai kebijakan dan arah strategis Rencana Bisnis BPR tahun 2023
10.	14 November 2022	6	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Hasil Analisa SWOT Tahun 2022 & Strategi tahun 20232. Pembahasan mengenai proyeksi kinerja BPR posisi Desember 20223. Pembahasan mengenai RBB tahun 20234. Pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tahun 2023
11.	28 Desember 2022	7	<ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan mengenai Perkembangan Usaha periode November 20222. Langkah-langkah yang akan dilakukan sampai dengan Desember 20223. Pembahasan mengenai debitur NPL inti dan



			Ayda
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam 1 tahun komisaris melaksanakan rapat 11 kali dimana dimana terdapat 4 kali Dewan Komisaris rapat dengan khusus sesama komisaris dan 7 kali rapat mengundang Direksi dan Pejabat eksekutif			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	2	9	100%
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	2	9	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris selalu hadir dalam setiap rapat dewan komisaris ataupun rapat bersama Direksi					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	1	1	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		1		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
FRAUD DILAKUKAN OLEH BAGIAN STAFF LEGAL BPR, DENGAN MEMBUAT KWITANSI PALSU								

**J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
Telah dilakukan laporan kepada kapolsek parung atas dugaan pidana debitur an. Nina Ekawati (Siyanto) karena adanya upaya debitur untuk melakukan kekerasan kepada petugas BPR an. MULawarman Harita		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
TIDAK ADA									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	14 Februari 2022	Sosial	Kegiatan sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah jaringan kantor BPR NBP 12 yaitu berupa pembagian Vitamin, handsanitizer dan Disinvektan	Masyarakat di wilayah jaringan kantor PT BPR Nusantara Bona Pasogit 12	Rp8.084.490,00
2.	29 September 2022	Sosial	Memberikan sembako berupa beras, indomie, makanan ringan, sajadah, makanan dan uang tunai kepada anak-anak	Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa	Rp5.867.040,00



bank nbp

pt bpr nbp 12 Raya Puspitek No. 39 Rt.003/004 Kp. Pondok Benda Kel Buaran, Kec.

Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten

Telepon: 021-7561275

			panti asuhan		
3.	28 Oktober 2022	Sosial	Ikut dalam kegiatan bantuan gempa di Cianjur yang disalurkan melalui PT NBP	PT NBP	Rp1.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama tahun 2022 BPR NBP 12 telah melakukan 3 kali kegiatan sosial yang dananya diambil dari kew lain cadangan perpuluhan					

Serpong, 30 Januari 2023

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12

Menyetujui

Melky Roma Tua Sinaga
Direktur Utama

Abraham Theo Pasabam Silaban
Komisaris Utama